



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSDIQ ALI SUHUDI
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 156592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.083.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 281 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.645.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 736.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, GRANDMAX MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



4. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	330.000.000
5. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	65.000.000
6. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	290.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	105.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	501.915.739
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.425.915.739
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.425.915.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.